
**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA MATA PELAJARAN PPKn di
SMK NEGERI 5 MATARAM**

Risa Nursafitri¹, Ris pawati², Bagdawansyah Al-Qadri³, L Sumardi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Mataram

Email: risaakbar1301@gmail.com¹, rispa64@gmail.com², bagda_alqadri@unram.ac.id³

Abstrak: Artikel ini membahas implementasi Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kurikulum Merdeka merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan fleksibilitas bagi guru dan siswa. Penerapannya dalam mata pelajaran PPKn telah dilakukan di berbagai sekolah, termasuk SMK Negeri 5 Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka dalam PPKn diterapkan melalui penggunaan modul terbuka, asesmen formatif dan sumatif, serta metode pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Penerapan kurikulum ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan diri, belajar secara mandiri, serta mengembangkan bakat dan keterampilan mereka. Kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka dalam PPKn berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Kata Kunci: Kurikulum, Merdeka, PPKn.

***Abstract:** This article discusses the implementation of the Independent Curriculum in learning Pancasila and Citizenship Education (PPKn). The Independent Curriculum is an innovation that aims to improve the quality of education by providing flexibility for teachers and students. Its implementation in the PPKn subject has been carried out in various schools, including SMK Negeri 5 Mataram. The results of the study show that the Independent Curriculum in PPKn is implemented through the use of open modules, formative and summative assessments, and project-based learning methods, collaboration, and problem solving. The implementation of this curriculum provides space for students to express themselves, learn independently, and develop their talents and skills. The conclusion of this article confirms that the implementation of the Independent Curriculum in PPKn has the potential to improve the quality of learning that is more meaningful and in accordance with the needs of students.*

***Keywords:** Curriculum, Independence, PPKn.*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu amanat dari konstitusi negara yaitu alinea ke empat UUD 1945, salah

satunya melalui pendidikan. Hal ini tentunya harus didukung oleh system yang dibangun secara bersama (Saleh, 2020). Salah satu bagian terpenting dari kehidupan untuk mengisi tujuan hidup bangsa yang merdeka yaitu pendidikan yang harus sejalan dengan perkembangan zaman (Siregar et al., 2020). Dan berkorelasi dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa *“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”*.

Pendidikan merupakan hak fundamental bagi setiap individu dan memiliki peran krusial dalam kehidupan. Pendidikan dapat membebaskan manusia dari keterbelakangan, ketidaktahuan, dan kemiskinan, serta berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten (Asmiati et al., 2022). Dari beberapa permasalahan tersebut harus ada upaya untuk memudahkan dan mempercepat tujuan pendidikan nasional, salah satunya dengan hadirnya kurikulum merdeka. Kurikulum ialah seperangkat bahan pengalaman belajar siswa dengan pedoman pelaksanaannya dengan sistematis yang dipedomani oleh sekolah dalam rangka mendidik siswa (Melia Sri Devi, 2020). Sejalan dengan pendapat (Susilowati, 2022) Kurikulum merdeka ialah kurikulum pembelajaran yang berhubungan dengan pendekatan minat, bakat guna perbaikan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang guna mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pemerintah, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melihat perlunya pengembangan kurikulum yang lebih baik dibandingkan kurikulum sebelumnya. Perubahan ini juga didorong oleh kebutuhan akan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan masa depan. Kurikulum Merdeka hadir sebagai solusi untuk mereformasi sistem pendidikan nasional, sekaligus menjawab berbagai kendala yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini mengurangi beban guru, termasuk penyederhanaan RPP, sehingga guru dapat lebih fokus dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan negara melalui proses pembelajaran (Ilmiah et al., 2020). Adapun RPP pada kurikulum merdeka berbeda dengan RPP pada kurikulum sebelumnya yang bisa mencapai dua uluh halaman lebih, sedangkan pada kurikulum merdeka jumlah halama RPP hanya satu halaman saja.

Implementasi kurikulum merdeka diharapkan menghasilkan pelajar yang berbudi luhur,

kompeten dan siap berkontribusi kepada masyarakat sesuai bidangnya (Ainia, 2020). Implementasi merupakan sebuah konsep dan definisi yang berkorelasi satu dengan lainnya terhadap sesuatu yang sistematis mengenai fenomena dengan tujuan untuk menerangkannya (Yaelasari & Yuni Astuti, 2022). Melalui kurikulum merdeka ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan reformasi pendidikan nasional. Reformasi pendidikan nasional mencakup penggunaan teknologi untuk percepatan, keberagaman sebagai inti, profil pelajar Pancasila, serta pembelajaran darurat. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka didasarkan pada landasan hukum, salah satunya adalah Keputusan Kemendikbudristek No 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran. Selain itu, Kurikulum Merdeka juga berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi kurikulum merdeka dirancang untuk lebih sederhana dan fleksibel, yang memungkinkan siswa untuk lebih aktif dan berkembang dengan pendekatan yang berfokus pada siswa. Hal ini tercapai karena kurikulum merdeka lebih relevan dan memberikan lebih banyak kesempatan untuk tugas berbasis proyek. Implementasi kurikulum merdeka sedang diuji cobakan oleh Pemerintah. Kurikulum baru ini merupakan reaksi pemerintah terhadap kemunduran belajar (*learning loss*) yang diakibatkan oleh pandemic dalam 2 tahun terakhir (Direktorat SMP Kemendikbud, 2022). Uji coba kurikulum merdeka dilakukan di sejumlah sekolah, baik yang mendaftar sebagai sekolah penggerak maupun sekolah yang melakukan uji coba secara mandiri. Uji coba tersebut diharapkan bisa memberikan Pelajaran dan praktik baik yang bisa dirujuk sebagai bahan perbaikan Ketika kurikulum merdeka diterapkan secara resmi.

Salah satu mata pelajaran dalam Kurikulum Merdeka adalah PPKn, yang dalam kurikulum ini dikenal sebagai Pendidikan Pancasila. Mata pelajaran ini menggabungkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, wawasan tentang NKRI, serta konsep kewarganegaraan (Ilham, 2022). Sebelumnya, dalam Kurikulum 2013, mata pelajaran ini dikenal sebagai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, namun dalam Kurikulum Merdeka namanya diubah menjadi Pendidikan Pancasila. Mata pelajaran ini menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan tujuan membentuk warga negara yang cerdas dan berakhlak mulia.

Mengacu pada panduan pembelajaran dan asesmen untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah tahun 2022 terkait implementasi Kurikulum Merdeka,

penerapan kurikulum ini dilakukan melalui pemanfaatan alur tujuan pembelajaran, modul ajar, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta asesmen pembelajaran. Strategi ini diterapkan di seluruh mata pelajaran dalam Kurikulum Merdeka, termasuk Pendidikan Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam. Fokus utama penelitian ini terletak pada pengumpulan data secara detail serta analisis menyeluruh terhadap informasi yang diperoleh (Setiawan, 2018). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari sumber utama melalui observasi dan wawancara dengan informan (Samsu, 2017:94), yang mencakup Kepala Sekolah, Guru PPKn, serta siswa. Data yang dikumpulkan mencerminkan pandangan serta pernyataan mengenai implementasi Kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 5 Mataram dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai sumber tambahan untuk memperkaya temuan penelitian (Samsu, 2017:95), meliputi dokumen sekolah, data institusi, visi dan misi sekolah, serta dokumen pendukung lainnya. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menerapkan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam penelitian Muhammad Thoyyib Fuady et al. (2022), yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Mata Pelajaran PPKn

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti akan menyajikan hasil analisis yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai temuan-temuan dalam penelitian ini. Berikut ini adalah uraian hasil analisis yang telah diperoleh dari proses penelitian yang telah dilakukan.

1. Implementasi Alur Tujuan Pembelajaran

Guru PPKn memiliki dan menggunakan alur tujuan pembelajaran PPKn sebagai dasar dalam menyusun modul ajar PPKn untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PPKn di sekolah tersebut. Dengan adanya alur tujuan pembelajaran ini, guru dapat mengikuti alur yang telah disediakan oleh pemerintah atau mengembangkan alur

pembelajaran sendiri. Penyusunan alur tujuan pembelajaran PPKn dilakukan melalui pelatihan, seperti bimbingan teknis (bimtek) tentang implementasi Kurikulum Merdeka. Sebagai bagian dari implementasi kurikulum tersebut, para guru mengikuti pelatihan berupa bimtek atau workshop untuk memahami dan menerapkan alur tujuan pembelajaran dalam setiap mata pelajaran, termasuk PPKn. Selain itu, guru PPKn juga dapat mengamati, meniru, dan memodifikasi alur tujuan pembelajaran yang telah disediakan oleh pemerintah.

Hal ini terkait erat dengan fungsi alur tujuan pembelajaran, yang berperan sebagai dasar bagi para guru dalam merencanakan pembelajaran, khususnya dalam menyusun modul ajar (Riswakhayuningsih, 2022a). Selain itu, menurut Kemendikbud, pemerintah menyediakan beberapa contoh alur tujuan pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk diamati, ditiru, dan dimodifikasi dalam penyusunan perangkat ajar (Kemendikbud, 2022). Penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) oleh sekolah dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran merupakan langkah strategis. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi kendala yang dihadapi guru dalam menyusun perangkat ajar, terutama dalam merancang alur tujuan pembelajaran, yang berpotensi memengaruhi kualitas hasil belajar siswa (Kusumawardhana et al., 2022). Oleh karena itu, pelatihan dalam bentuk bimtek untuk meningkatkan pemahaman guru, khususnya guru PPKn, menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PPKn.

Sejalan dengan fungsi alur tujuan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka, yaitu sebagai silabus yang menjadi acuan bagi guru dalam merancang perencanaan pembelajaran atau menyusun modul ajar yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran di akhir fase serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila (Riswakhayuningsih, 2022b). Dalam Kurikulum Merdeka, alur tujuan pembelajaran dapat diibaratkan sebagai perjalanan menuju suatu tempat, di mana tujuan akhirnya adalah capaian pembelajaran. Untuk mencapai capaian tersebut, siswa perlu melalui serangkaian tahapan dalam alur tujuan pembelajaran yang telah tersusun secara berurutan berdasarkan tujuan pembelajaran sebelumnya (Muna & Fathurrahman, 2023).

Dapat disimpulkan bahwa pembuatan alur tujuan pembelajaran PPKn dilakukan melalui pelatihan, seperti bimbingan teknis (bimtek) tentang implementasi kurikulum merdeka. Para guru mendapatkan pelatihan untuk memahami dan menerapkan alur tujuan pembelajaran (ATP) pada mata pelajaran PPKn. Guru dapat mengamati, meniru, dan menyesuaikan ATP yang telah disediakan oleh pemerintah. ATP ini menjadi dasar dalam penyusunan modul ajar

PPKn yang sesuai dengan kurikulum merdeka, dengan tujuan untuk mencapai capaian pembelajaran yang diinginkan. ATP berfungsi sebagai silabus dalam kurikulum merdeka, memberikan pedoman bagi guru dalam merencanakan pembelajaran, serta memastikan pencapaian capaian pembelajaran yang diharapkan pada akhir fase dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

2. Implementasi Modul Ajar PPKn

Guru PPKn menggunakan modul ajar PPKn dalam implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn. Dalam penggunaannya modul ajar diselaraskan dengan kebutuhan siswa dan didukung dengan buku ajar siswa sebagai bahan pendukung belajar. Pembuatan modul ajar dilaksanakan dengan melihat modul ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah dalam hal ini dari kementerian pendidikan dengan kata lain guru dalam membuat modul ajar dengan cara melihat contoh yang sudah ada dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa guna implementasi kurikulum merdeka. Guru mendapatkan pelatihan dalam membuat modul ajar. Hal tersebut didapatkan melalui workshop maupun MGMP PPKn sehingga dengan adanya pelatihan dalam membuat modul ajar, guru dapat mengembangkan modul ajarnya sesuai dengan kebutuhan maupun karakteristik siswa. Secara keseluruhan, modul ajar sangat diperlukan dalam implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn. Oleh karena itu, pelatihan dan dukungan berupa bimtek, workshop, dan kebebasan dalam mengembangkan modul ajar diberikan kepada guru guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan kurikulum merdeka.

Kemudian pelatihan yang didapatkan oleh guru dalam membuat modul ajar berkorelasi dengan tingginya tuntutan akan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang guru dalam kurikulum merdeka telah mendorong pentingnya Bimtek sebagai salah satu solusi bagi individu, instansi, atau lembaga. Bimtek menyajikan seluruh informasi secara operasional dan teknis, disesuaikan dengan kebutuhan peserta, sehingga setelah mengikuti kegiatan Bimtek ini, peserta akan dapat meningkatkan kompetensinya (Mulyanto et al., 2023). Dalam upaya pengembangan modul ajar, seorang guru perlu mengadaptasi modul tersebut sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Modul ajar merupakan bahan pembelajaran yang dirancang secara sistematis sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Materi ini disusun dalam unit-unit kecil agar peserta didik dapat mempelajarinya secara mandiri dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan mencapai penguasaan kompetensi yang ditargetkan. Berkorelasi dengan pembuatan modul ajar

PPKn yang dilakukan oleh guru, menurut (Kesumawati et al., 2021) pembuatan modul sangat penting dan membantu peserta didik dalam pembelajaran oleh karena itu pelatihan pembuatan modul ajar sangat dibutuhkan. Selain itu juga, pembuatan modul ajar yang kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di kelas (Nadeak & Elfaladonna, 2023).

Modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pelaksanaan, media pendukung, serta metode penilaian yang digunakan dalam suatu unit atau topik pembelajaran berdasarkan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Modul ini memiliki kemiripan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), namun dengan cakupan yang lebih luas, sehingga sering disebut sebagai RPP Plus. Keberadaan modul ajar memberikan berbagai keuntungan bagi pendidik, antara lain:

- a. Membantu pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran dengan lebih sistematis.
- b. Mendukung kelancaran serta meningkatkan efektivitas pembelajaran.
- c. Berperan sebagai pedoman bagi pendidik dalam mengelola kegiatan belajar mengajar.
- d. Menyediakan struktur yang menjelaskan langkah-langkah serta pengelolaan pembelajaran agar sesuai dengan target yang telah ditentukan.
- e. Mendorong tercapainya kompetensi dalam Capaian Pembelajaran serta memperkuat Profil Pelajar Pancasila pada setiap jenjang perkembangan dalam suatu mata pelajaran.

Modul ajar juga berfungsi sebagai acuan untuk mencapai Capaian Pembelajaran pada fase yang relevan, sebagaimana dijelaskan dalam Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Penyusunan dan pelaksanaannya dapat melibatkan wali kelas serta pendidik mata pelajaran (Kemendikbud, 2022). Dengan demikian penggunaan modul ajar dalam kurikulum merdeka merupakan bagian penting yang harus digunakan secara umum dan khususnya pada mata pelajaran PPKn.

Dapat disimpulkan bahwa Pembuatan modul ajar PPKn di SMK Negeri 5 Mataram mengacu pada modul ajar yang disediakan oleh pemerintah. Guru memodifikasi modul tersebut sesuai kebutuhan siswa untuk implementasi kurikulum merdeka. Guru-guru mendapatkan pelatihan untuk membuat modul ajar PPKn melalui workshop dan MGMP PPKn. Modul ajar sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka. Pelatihan ini sesuai dengan tuntutan kompetensi guru dalam kurikulum merdeka. Modul ajar digunakan dengan buku ajar siswa sebagai pendukung pembelajaran,

membimbing pendidik, memperlancar proses pembelajaran, dan memberikan panduan serta kerangka kerja.

3. Implementasi Asesmen Pembelajaran PPKn

Salah satu komponen dalam Kurikulum Merdeka adalah pelaksanaan asesmen pembelajaran pada setiap mata pelajaran, termasuk PPKn. Asesmen merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran yang memberikan informasi menyeluruh kepada pendidik dan siswa untuk menentukan langkah pembelajaran selanjutnya. Pada mata pelajaran PPKn, terdapat tiga jenis asesmen yang digunakan, yakni asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Proses perencanaan asesmen dilakukan dalam tiga tahap, yaitu sebelum pembelajaran untuk menilai aspek kognitif dan non-kognitif, asesmen formatif yang berlangsung selama kegiatan belajar mengajar, serta asesmen sumatif yang diterapkan di akhir pembelajaran melalui observasi guru, ujian tertulis, atau proyek.

Pengolahan dari asesmen ini melibatkan nilai dari berbagai aspek seperti performa proses, nilai diskusi, sikap, dan nilai ujian akhir yang digabungkan dari proses yang sudah dilakukan. Dengan demikian, dalam mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 5 Mataram, asesmen menjadi bagian penting dalam proses pengukuran dan evaluasi pencapaian hasil belajar siswa.

Sejalan dengan demikian adapun teknik asesmen formatif maupun sumatif menurut Kemendikbud dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya sebagai berikut :

- a. Observasi
- b. Kinerja
- c. Proyek
- d. Tes tertulis
- e. Tes lisan
- f. Penugasan
- g. Portofolio

Berdasarkan pendapat Susanti Sufyadi dkk. (2021:46), asesmen diagnostik dilaksanakan pada tahap awal pembelajaran serta saat memulai suatu materi baru. Sementara itu, asesmen formatif berlangsung selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa. Di sisi lain, asesmen sumatif diterapkan setelah menyelesaikan suatu lingkup materi pada akhir fase dan dapat digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Selain itu, asesmen

sumatif juga dapat dilakukan di akhir semester dengan menitikberatkan pada kompetensi yang telah dipelajari selama periode tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa asesmen dalam mata pelajaran PPKn terdiri dari tiga tahap: diagnostik, formatif, dan sumatif. Perencanaan asesmen mencakup tahap sebelum, selama, dan akhir pembelajaran. Proses asesmen melibatkan nilai dari berbagai aspek seperti performa proses, diskusi, sikap, dan ujian akhir. Asesmen menjadi bagian penting dalam pengukuran dan evaluasi hasil belajar siswa. Teknik asesmen formatif dan sumatif mencakup observasi, penilaian kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Asesmen diagnostik dilaksanakan di awal pembelajaran, asesmen formatif selama proses pembelajaran berlangsung, dan asesmen sumatif dilakukan di akhir fase pembelajaran atau akhir semester untuk mengonfirmasi pencapaian hasil belajar.

B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kurikulum Merdeka

1. Faktor Pendukung

a. Faktor Internal

1) Adanya Komitmen dari Guru

Guru-guru PPKn dari SMK Negeri 5 Mataram menyatakan dukungan terhadap kurikulum merdeka, terutama dalam mata pelajaran PPKn yang erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun bentuk dukungannya yaitu menekankan perlunya peningkatan kompetensi guru dalam aspek pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional guna memberikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif sehingga siswa tidak merasa bosan dalam belajar. Selain itu juga, bentuk dukungan guru PPKn mencakup penerapan kurikulum merdeka dalam kegiatan belajar di kelas serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai perangkat- perangkat dalam kurikulum merdeka, termasuk penggunaan modul ajar dan integrasi proyek penguatan pelajar Pancasila dengan profil pelajar Pancasila.

Menurut KBBI faktor pendukung ialah suatu hal atau kondisi yang dapat mendukung atau menumbuhkan suatu kegiatan. Dalam implementasi kurikulum merdeka setidaknya ada beberapa faktor pendukung menurut (Iskandar et al., 2023) diantaranya sebagai berikut:

- a. Partisipasi yang aktif dari guru dan sekolah dalam pengembangan
- b. kurikulum.
- c. Penyediaan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.
- d. Adanya evaluasi atau perbaikan yang dilakukan bahwa kurikulum yang

e. dipakai dapat memenuhi kebutuhan siswa.

Selaras dengan yang disampaikan oleh (Anridzo et al., 2022), bahwa dalam implementasi kurikulum merdeka strategi dari guru sangat dibutuhkan sebagai faktor pendukung dalam pengajaran, membimbing dan membina siswa guna memberikan pembelajaran dan pemahaman yang moderat dan beragam. Sejalan dengan hal tersebut, faktor pendukung mencakup segala pengaruh, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang berperan dalam memperkuat pendidikan karakter peserta didik, seperti sumber daya manusia serta sarana dan prasarana sekolah (Doni Angyanur et al., 2022).

Menurut (Yunita, 2023) pelaksanaan kurikulum merdeka belajar, terdapat faktor pendukung yang terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang muncul adalah keberadaan nilai-nilai multikultural yang mengharuskan guru memiliki toleransi yang tinggi penanaman nilai-nilai multikultural didukung dengan fasilitas yang memadai untuk guru dan Selain itu, guru di sekolah mempermudah implementasi kurikulum merdeka belajar. Sementara itu, faktor eksternal yang terkait dengan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan adalah keberagaman siswa dalam hal budaya, daerah, dan sosial.

2) Kualifikasi guru yang memiliki gelar sarjana S-1

Salah satu faktor pendukung implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn adalah kualifikasi guru PPKn yang mengajar pada kurikulum merdeka, yang umumnya hanya memiliki gelar sarjana S1. Tidak ada guru PPKn dengan gelar pendidikan tingkat S2. Hal ini sesuai dengan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Kualifikasi merujuk pada kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau memegang posisi tertentu, dengan aspek kualifikasi mencakup latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang atau mata pelajaran yang diajarkan (Jahidi, 2014).

Seiring dengan hal tersebut, seorang guru atau pendidik yang kompeten harus memiliki minimal gelar sarjana S1 atau diploma IV, memiliki keahlian dalam berbagai aspek kompetensi (seperti pedagogi, profesionalisme, keterampilan sosial, dan integritas moral), serta telah memperoleh sertifikat pendidikan dan menjaga kesehatan fisik dan mentalnya (Lafendry, 2020). Seorang guru di SMP/MTs atau SMA/MA diharuskan memiliki setidaknya gelar diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) di program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Selain itu, guru juga harus memiliki kemampuan profesional yang kuat,

termasuk penguasaan terhadap materi, struktur, konsep, dan pemahaman mendalam terkait bidang keilmuannya yang mendukung mata pelajaran yang diajarkan (Masoka & Indriwati, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa Guru memberikan dukungan penuh terhadap penerapan kurikulum merdeka. Mereka mendorong peningkatan kompetensi dan mengambil langkah aktif dalam melaksanakan kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn. Dalam melaksanakan tugas pendidikan, mayoritas guru yang terlibat memiliki kualifikasi pendidikan hingga tingkat sarjana S-1, sesuai dengan standar keahlian dan kompetensi yang diharapkan dari seorang pendidik profesional. Hal ini sejalan dengan upaya untuk memastikan bahwa implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn berlangsung efektif dan memberikan dampak positif dalam pembelajaran siswa.

b. Faktor Eksternal

1) Adanya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran PPKn. Dukungan ini terlihat dari ketersediaan fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, dan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Keberadaan sarana dan prasarana di sekolah tersebut berperan dalam mendukung keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PPKn.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azzahra et al. (2023) terkait penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran IPAS di SDN 4 Purwawanangun, faktor pendukung utama dalam implementasi kurikulum ini adalah tersedianya sarana dan prasarana. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Khikmah (2020), yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu program di sekolah sangat bergantung pada kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana merupakan faktor eksternal yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran PPKn. Faktor ini terbukti melalui tersedianya ruang kelas, perpustakaan, dan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran, yang turut berperan dalam keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka di mata pelajaran PPKn di sekolah tersebut.

2. Faktor Penghambat

a. Faktor Internal

1) Kurangnya Partisipasi dari Siswa

Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran kurang aktif. Terlihat kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran serta kurangnya inovasi dan kreativitas dalam pendekatan pembelajaran. Secara keseluruhan, pandangan siswa melalui wawancara dan hasil observasi menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap implementasi kurikulum merdeka, terutama dalam mata pelajaran PPKn. Siswa merasa kurang terlibat, bosan, dan tidak termotivasi dalam proses pembelajaran.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam proses pembelajaran, seorang guru sebaiknya dapat mendorong aktivitas belajar agar siswa dapat terlibat secara aktif. Dengan partisipasi siswa yang optimal, pengalaman belajar dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien (Hikmah, 2020). Oleh karena itu, guru memiliki peran yang sangat penting dalam memilih strategi yang tepat untuk mendorong partisipasi siswa dalam proses pembelajaran (Betari & Junaidi, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa bahwa partisipasi siswa dalam proses pembelajaran saat ini kurang aktif. Ini disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan teknologi, kurangnya inovasi, dan kreativitas dalam pendekatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap implementasi kurikulum merdeka, terutama dalam mata pelajaran PPKn. Siswa sering merasa kurang terlibat, bosan, dan tidak termotivasi selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong partisipasi siswa dengan memilih strategi yang tepat untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien.

2) Kurangnya Jumlah Guru

Terdapat hambatan sekaligus tantangan signifikan terkait dengan jumlah guru PPKn di SMK Negeri 5 Mataram. Dengan hanya tiga guru PPKn yang aktif, terbagi untuk kelas X, XI dengan kurikulum merdeka, dan kelas XII dengan kurikulum 2013, sekolah menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan pembelajaran yang optimal. Penerapan kurikulum merdeka dalam mata pelajaran PPKn menghadapi kendala tertentu. Salah satu kendala utama adalah minimnya jumlah guru PPKn yang tersedia. Keterbatasan ini menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk mata pelajaran PPKn. Dalam konteks ini, sekolah menghadapi tantangan yang berarti dalam menjalankan kurikulum merdeka khususnya untuk mata pelajaran PPKn. Kendala ini berasal dari jumlah guru PPKn yang minim dan pembagian tugas pengajaran dengan

kurikulum lain. Hambatan sekaligus tantangan ini berdampak pada upaya sekolah dalam memberikan pembelajaran yang optimal sesuai dengan visi kurikulum merdeka.

Berkorelasi dengan hal tersebut, menurut (Damayanti et al., 2022) adapun tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka diantaranya sebagai berikut :

- a. Keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh guru
- b. Menguasai keterampilan dasar untuk kebutuhan belajar di era digital
- c. Pandai dalam mengelola kelas
- d. Refrensi yang terbatas

Menurut (Rahmayumita & Hidayati, 2023) bahwa implementasi kurikulum merdeka tantangan utamanya adalah persiapan guru dan staf sekolah yang perlu ditingkatkan. Pada awal pelaksanaannya, guru dan staf sekolah menghadapi kesulitan dalam mengadopsi paradigma baru dalam proses belajar mengajar dan menyesuaikan administrasi sekolah dengan pedoman kurikulum merdeka.

Dapat disimpulkan bahwa guru PPKn dihadapkan pada hambatan sekaligus tantangan serius terkait dengan jumlah guru yang terbatas dalam mata pelajaran PPKn. Dengan hanya tiga guru PPKn yang aktif, mereka harus mengajar berbagai tingkatan, yaitu kelas X, XI yang menggunakan kurikulum merdeka, serta kelas XII dengan kurikulum 2013. Akibatnya, hanya ada dua guru yang tersedia untuk mengajar kurikulum merdeka, masing-masing di kelas X dan XI. Keterbatasan ini menjadi tantangan bagi guru PPKn dalam menerapkan kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn. Selain itu, ada tantangan tambahan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, seperti kebutuhan akan keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh guru, penguasaan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk pembelajaran di era digital, kemampuan dalam mengelola kelas, serta keterbatasan sumber referensi.

- b. Faktor Eksternal
 - 1) Fluktuasi Kebijakan Pemerintah

Fluktuasi kebijakan pemerintah merupakan faktor eksternal yang menghambat daripada implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn. Kebijakan pemerintah yang setiap berganti menteri berganti kurikulum, dapat menghambat daripada jalannya suatu kurikulum termasuk kurikulum merdeka.

Berkorelasi dengan adanya fluktuasi kebijakan pemerintah terkait dengan kurikulum adalah salah satu masalah pendidikan di Indonesia (Daga, 2020). Selain itu, dengan adanya perubahan kurikulum pendidikan yang sudah dilaksanakan tidak dapat membawa dampak memberikan dampak yang baik terhadap kualitas pendidikan, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah (Setiawati, 2022).

Dapat disimpulkan bahwa fluktuasi kebijakan pemerintah, terutama perubahan kurikulum saat berganti menteri, merupakan faktor eksternal yang menghambat implementasi kurikulum merdeka dalam mata pelajaran PPKn. Perubahan kurikulum yang sering terjadi tidak memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan, menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Masalah fluktuasi kebijakan pemerintah terkait kurikulum adalah tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian penulis di lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran PPKn telah dilaksanakan dengan baik, sebagai berikut:

Kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran PPKn telah diterapkan. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan alur tujuan pembelajaran PPKn sebagai dasar atau pedoman bagi guru dalam menyusun modul ajar PPKn, penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai sarana pembentukan karakter siswa yang selaras dengan kegiatan intrakurikuler, serta pelaksanaan asesmen pembelajaran PPKn sebagai bentuk penilaian yang dilakukan oleh guru.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum merdeka terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung, yaitu: (1) Faktor internal, yakni meliputi dukungan dari guru untuk meningkatkan kompetensinya, menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Selain itu, adanya dukungan dari siswa yang terkait dengan aktivitas dalam kurikulum merdeka. Kemudian adanya kualifikasi pendidikan guru tingkat sarjana S1 yang menjadikan landasan keprofesionalannya dalam bidang ilmu yang diampu yaitu mata pelajaran PPKn, (2) Faktor eksternal, diantaranya sarana dan prasarana yang dimiliki meliputi ruang kelas, perpustakaan dan bahan ajar. Sedangkan faktor penghambat yaitu: (1) Faktor internal, meliputi kurangnya partisipasi dari siswa yang disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan teknologi, kurangnya inovasi, dan kreativitas dalam pendekatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap implementasi

kurikulum merdeka, terutama dalam mata pelajaran PPKn. Selain itu, kurangnya jumlah guru PPKn dengan hanya tiga guru PPKn yang aktif, (2) Faktor eksternal, meliputi kurangnya media belajar ini dikarenakan keterbatasan fasilitas internet, ketersediaan media pembelajaran yang terbatas, dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Fluktuasi kebijakan pemerintah terhadap kurikulum akibat dari berganti menteri berganti kebijakan termasuk kurikulum

DAFTAR PUSTAKA

- Alqadri, B., Kurniawansyah, E., & Fauzan, A. (2021). Habituaasi Nilai-Nilai Karakter Sebagai Perilaku Anti Korupsi Pada Masyarakat Kajang. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1), 10–29. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i1.178>
- Anggito, & Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Asmiati, A., Sumardi, L., Ismail, M., & Alqadri, B. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Melanjutkan Studi Anak Pada Masyarakat Nelayan di Desa Seruni Mumbul Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 786–793. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.645>
- Azzahra, I., Aan Nurhasanah, & Eli Hermawati. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran IPAS di SDN 4 Purwawinangun. *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 9(2), 6230–6238. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.1270>
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063–1073.
- Betari, R., & Junaidi, J. (2020). Upaya Meningkatkan Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran Sosiologi Melalui Model Prediction Guide dengan Media Gambar Kelas X IPS 3 SMAN 12 Padang. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(1), 19–26. <https://doi.org/10.24036/sikola.v2i1.62>
- BPS. 2023. *Data Susenas Mengungkap Masalah Pendidikan di Indonesia*. Badan Pusat Statistik (bps.go.id). Diakses pada tanggal 5 Januari 2023
- Daga, A. T. (2020). Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Sekolah Dasar (Sebuah Tinjauan Kurikulum 2006 hingga Kebijakan Merdeka Belajar). *Jurnal Edukasi Sumba (JES)*, 4(2), 103–110. <https://doi.org/10.53395/jes.v4i2.179>
- Damayanti, A. D., Jannah, A. N., & Agustin, N. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka

- Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Smp Muhammadiyah 19 Sawangan. Prosiding Samasta, 29.
- Hikmah, M. (2020). Penerapan Model Project Based Learning Untuk Meningkatkan Partisipasi Dan Hasil Belajar Pemrograman Dasar Siswa. *Jurnal Teknodik*, 27–38. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i2.376>
- Ilmiah, J., Education, M., Ilmiah, J., & Education, M. (2020). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. 6(1), 126–136.
- Jahidi, J. (2014). KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI GURU. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan*, 2(1), 23–30. <https://jurnal.unigal.ac.id/adpen/article/view/189>
- Kemenkopmk. 2021. Tingkat Literasi Indonesia Memprihatinkan, Kemenko PMK Siapkan Peta Jalan Pembudayaan Literasi Nasional. <https://www.kemenkopmk.go.id/tingkat-literasi-indonesia-memprihatinkan-kemenko-pmk-siapkan-peta-jalan-pembudayaan-literasi>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2024
- Kesumawati, N., Destiniar, Octaria, D., Yunika, L. N., Fitriasari, P., Septiani Mulbasari, A., Dei Nopriyanti, T., & Marga Retta, A. (2021). Pelatihan pembuatan modul ajar bagi guru SMA/SMK di Tebing Tinggi. *ABSYARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 246–256. <https://doi.org/10.29408/ab.v2i2.4589>
- Khikmah, N. (2020). Manajemen Sarana Dan Prasarana Untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3, 123–130. <https://doi.org/10.17977/um027v3i22020p123>
- Kusumawardhana, B., Hudah, M., Setiawan, D. F., Widiyatmoko, F. A., & Royana, I. F. (2022). Pendampingan Penyusunan Modul Ajar Kurikulum Merdeka Bagi Guru PJOK Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Olahraga Masyarakat (JPOM)*, 3(2), 82–88. <https://doi.org/10.26877/jpom.v3i2.13926>
- Lafendry, F. (2020). Kualifikasi dan kompetensi guru dalam dunia pendidikan. *Tarbawi*, 3(3), 1–16. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Tarbawi/article/view/166>
- Masoka, M., & Indriwati, S. E. (2017). Kompetensi Guru Bidang Studi Biologi Smp — Sma Sebagai Basis Program. 4, 516–523. Muhammad Thoyyib Fuady, H. A. F. B. A., 2022. Peran Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaran Dalam Peningkatan Soft Skill. *Manazhim*, 4(2), pp. 295-307.

- Mulyanto, A., Dewi, O. R., Normansyah, A. D., & ... (2023). Bimbingan Teknis Guru dan Kepala Sekolah Dalam Menyusun Modul Ajar Pada Kurikulum Merdeka. ... *Journal of Civil ...*, 5(1), 72–82. <https://doi.org/10.35970/madani.v1i1.1697>
- Muna, I., & Fathurrahman, M. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Matematika di SD Nasima Kota Semarang. *Jurnal Profesi Keguruan*, 9(1), 99–107.
- Nadeak, E., & Elfaladonna, F. (2023). Pelatihan Pembuatan Modul Ajar Interaktif Bagi Guru dengan Menggunakan Canva (Studi Kasus : SDN 204 Palembang). 2(3), 201–206.
- Rahmayumita, R., & Hidayati, N. (2023). Kurikulum Merdeka : Tantangan dan Implementasinya pada Pembelajaran Biologi. 3(1), 1–9.
- Riswakhuningsih, T. (2022a). Pengembangan Alur Tujuan Pembelajaran (Atp). *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 7(1), 20–30. <http://ojs.batangkab.go.id/index.php/ristek/article/view/123/225>
- Riswakhuningsih, T. (2022b). Pengembangan Alur Tujuan Pembelajaran (Atp) Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (Ipa) Kelas Vii Smp. *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 7(1), 20–30. <http://ojs.batangkab.go.id/index.php/ristek/article/view/123>
- Saleh, M. (2020). Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*, 1(1), 51–56.
- Setiawati, F. (2022). Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum terhadap Pembelajaran di Sekolah. *Nizamul ‘Ilmi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (JMPI)*, 07(1), 1–17.
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 141–157. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.13>